

PENGANTAR

Kekacauan dan Keteraturan Sosial Atas Keberagaman Beragama

Indonesia terus mengalami gelombang konflik nilai, dalam hal ini yang menjadi fokus penulis adalah konflik nilai keberagaman beragama. Konflik nilai pada dasarnya terjadi karena adanya perbedaan dalam menafsirkan nilai itu sendiri. Perbedaan di sini diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar umat beragama, serta kedewasaan pengetahuan dalam menyikapi perbedaan itu sendiri. Kurangnya komunikasi ini, berhubungan dengan minimnya ruang interaksi sosial masyarakat.

Pertanyaannya, apakah bangsa ini tidak pernah belajar dari sejarah masa lalu? Konflik Ambon, Poso, Sampit, Kupang, Situbondo dan tentunya masih banyak kisah-kisah kelam terkait dengan masalah ini, yang dapat menjadi sebuah refleksi konstruksi filosofi keadaban beragama ini. Bukankah refleksi sejarah setidaknya dapat menjadi awal dari proses kesadaran beragama ini. Atau bangsa ini sedang mengalami amnesia sejarah?

JANUSITAS IMPLIKASI SOSIAL REFORMASI

Setelah berakhirnya musim “kemarau kebebasan” pada tahun 1998, bangsa ini seperti mendapatkan anugerah berupa hujan kebebasan. Di tengah dahaga kebebasan yang berkepanjangan, akhirnya bangsa ini dapat menikmati apa yang dinamakan kebebasan hak asasi. Bahkan demi melegitimasi proses pengaliran kebebasan, negara menjaminkannya dalam konstitusi UUD 1945 yang di amandemen - antara lain sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28.

Seiring perjalanan era reformasi yang ditandai dengan kebebasan hak asasi. Ternyata implikasi era reformasi ini bersifat

janusitas. Janusitas implikasi berupa implikasi positif dan negatif.

Implikasi positif di era reformasi ini ditandai dengan kebebasan dalam menyampaikan segala bentuk aspirasi, baik itu bersifat individu maupun kolektif. Berdasarkan fakta sosial, implikasi positif dari proses ini melahirkan kesadaran kolektif sebagai modal sosial dalam memperkuat posisi masyarakat sebagai kontrol sosial negara dan penguasa.

Sedangkan implikasi negatif, yaitu terjadinya apa yang disebut oleh Aguste Comte sebagai kekacauan sosial. Kekacauan sosial ini disebabkan karena pemaknaan terhadap kondisi sosial yang terlalu sempit dan berlebihan. Kondisi sosial yang dimaksud adalah kebebasan masyarakat itu sendiri. Karena pemaknaan yang terlalu sempit dan berlebihan serta lemahnya peran institusi sosial sebagai agen pendidikan masyarakat, jelas ini akan memperburuk kekacauan sosial yang direproduksi oleh masyarakat itu sendiri.

Wujud konkret dari implikasi positif yang terakomodasi dengan baik, jelas akan memperkuat rasa solidaritas masyarakat. Sebaliknya jika tidak terakomodasi dengan baik, maka yang ada akan melahirkan disorganisasi sosial. Lalu bagaimanakah kontekstualisasi janusitas implikasi ini terhadap keberagaman beragama di Indonesia kekinian?

TAFSIR SOSIOLOGIS ATAS KEBERAGAMAN BERAGAMA

Sosiolog Durkheim dalam bukunya *The Elementary Forms of Religious Life* menyatakan, bahwa agama merupakan sistem simbol yang ada di masyarakat. Di mana dari sistem ini menjadi dasar mengapa masyarakat memiliki kepercayaan agama, dan untuk itu setiap masyarakat memiliki kepercayaan agama yang berbeda satu sama lain. Secara asasi, kepercayaan terhadap suatu agama merupakan hal yang prinsipil bagi manusia itu sendiri. Bicara mengenai suatu yang prinsipil, jelas dalam tatanan struktur sosial manusia memiliki apa yang dinamakan hak asasi beragama.

Untuk itu, hak asasi beragama atau kebebasan beragama jelas tidak sama dengan kebebasan berpikir atau bertindak. Kebebasan

beragama merupakan suatu bentuk prinsipil spiritualitas individu terhadap agama yang diyakininya berdasarkan agama yang diakui oleh negara. Di mana agama yang diakui di Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UU nomor 1/PNPS tahun 1965 pasal 1, yaitu, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Lebih lanjut, kebebasan beragama ini pun dijamin oleh negara secara konstitusi pada UUD 1945 pasal 29.

Agama sendiri pada dasarnya menjadi sebuah fondasi yang menciptakan kedamaian dan harmonisasi hidup setiap manusia, baik itu secara individu maupun dasar interaksi sosialnya dengan masyarakat umum. Akan tetapi secara *das sollen*, makna esensi dari agama itu justru jauh dari apa yang diharapkan. Di mana pada kehidupan keberagaman agama ini justru menjadi unsur konflik nilai di masyarakat. Tidak hanya didasari karena sikap bahwa agamanyalah yang paling benar, tetapi keadilan sosial, ekonomi dan politik turut menjadi pemicu konflik agama dewasa ini.

Secara sosiologis, konflik keberagaman beragama ini terjadi akibat kurangnya ruang interaksi-komunikasi, yang akhirnya berdampak terjadinya prasangka sosial antar umat beragama. Sikap prasangka ini menimbulkan rasa saling curiga satu sama lain, tidak hanya curiga dengan umat agama lain tetapi dengan umat agama yang sama pun saling berprasangka.

Akibat adanya prasangka ini, maka krisis keberagaman beragama pun semakin menjadi ancaman yang nyata dalam terciptanya konflik nilai. Sebab konflik sendiri merupakan suatu sistem yang tidak stabil dari setiap kelompok atau individu-individu yang saling bertentangan. Ketidakstabilan sistem ini merupakan rangkaian dari akumulasi prasangka yang tidak terakomodasi dengan baik di lingkungan masyarakat itu sendiri - dalam hal ini lemahnya peran lembaga atau organisasi keagamaan untuk menciptakan manusia yang bermakna dan humanis berdasarkan esensi ajaran agama itu sendiri.

Ketidakstabilan sistem yang terus tidak terkendali ini, kelak akan menciptakan kondisi masyarakat yang semakin tidak terkendali, sebab pada dasarnya setiap manusia memuaskan egoismenya sendiri. Untuk itulah peran negara dan lembaga atau organisasi keagamaan di sini sangat berperan dalam meminimalisir

ketidakstabilan sistem ini.

Di sini peran negara tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai mediator dalam menciptakan kerukunan beragama di Indonesia. Selain itu, peran lembaga atau organisasi keagamaan pun turut memberikan kecerdasan pemahaman bagi setiap umatnya akan adanya sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, bukan justru menjadi agen sosial provokasi-prasangka yang memicu konflik beragama itu sendiri.

Hubungan kehidupan antar umat beragama di era kebebasan ini begitu banyak melahirkan berbagai wacana sosial yang *hidden controversy*. Hal ini terjadi akibat adanya ketegangan yang dipicu dari ketidakadilan akumulasi harapan masyarakat terhadap sistem sosial yang ada. Dan parahnya, kondisi ketegangan ini didramaturgikan oleh oknum-oknum intelektual tertentu sebagai sutradara konflik demi suatu tujuan tertentu yang sifatnya politis.

STIMULUS KETEGANGAN

Ketegangan sosial dalam kehidupan antar umat beragama secara sistem dipengaruhi oleh kondisi sistem global dan sistem lokal di masyarakat itu sendiri. Secara global, sistem ketegangan sosial ini terjadi akibat stimulus definisi sosial atas suatu peristiwa konflik keagamaan yang berkembang di suatu negara lain.

Konflik agama yang terjadi di negara lain secara psikologi sosial tentu berefek terhadap stimulus reaksi masyarakat di tataran lokal (baca: dalam negeri). Misalnya saja pada tahun 2010 lalu, isu pembakaran Al-Qur'an oleh Pendeta Terry Jones di Amerika Serikat, yang memicu reaksi umat Islam dunia terhadap pemerintahan Barack Obama, dan mungkin saja memicu kebencian terhadap agama lain yang sifatnya *hidden conflict* atau *laten conflict*.

Lalu untuk sistem lokal, ketegangan biasanya dipicu melalui perantara sosial yang sifatnya destruktif. Perantara ini memanfaatkan situasi sosiologis - psikologis masyarakat yang sedang tidak stabil. Bentuk destruktif ini berupa agitasi atau rekayasa sosial yang memancing reaksi irasional masyarakat. Reaksi irasional ini didahului dengan sikap pemikiran prasangka

negatif, dan kemudian terus dipompa secara agitasi yang berujung terhadap tindakan fisik anarkis.

Oleh karena itu, kondisi ketegangan ini perlu kiranya mendapatkan karantina komunikatif yang sifatnya dialogis dalam suatu wadah. Di mana krisis ketegangan antar umat beragama justru bukan terpusat pada kaum elite agama tetapi ada dalam struktur sosial akar rumput masyarakat, yang kemudian didramatisir oleh oknum intelektual.

INTEGRATED COMMUNITY SPACE

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa justru ketegangan yang besar ada dalam akar rumput masyarakat dan ditambah lagi tidak adanya ruang akomodasi interaksi masyarakat. Maka diperlukah sebuah ruang mediasi yang mampu meminimalisasi serta memamanajemen permasalahan di akar rumput ini. Dalam hal ini meminimalisasi konflik nilai atas keberagaman beragama.

Berangkat dari masalah dasar atas terjadinya berbagai masalah konflik nilai agama, yaitu kurangnya interaksi sosial antar umat beragama dalam tataran akar rumput. Untuk itu berdasarkan analisis fakta dan definisi sosial, kiranya diperlukan sebuah alternatif rutinitas ruang interaksi yang ada di setiap lingkungan kecil akar rumput masyarakat, baik itu di lingkungan Rukun Tangga (RT), Rukun Warga (RW) sampai tingkat Kelurahan. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama bersifat *bottom-up* di akar rumput. Ruang interaksi itu adalah *integrated community space*.

Integrated community space secara filosofis merupakan ruang atau tempat terpadu yang digunakan oleh masyarakat sebagai ruang untuk melakukan kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya interaksi. Sehingga diharapkan term Bhinneka Tunggal Ika dapat terinternalisasi menjadi identitas bangsa dari proses kegiatan masyarakat yang sifatnya kebudayaan. Identitas bangsa bukanlah suatu yang dilahirkan tetapi melalui proses kebudayaan.

Adapun bentuk kegiatan *integrated community space* ini antara lain berupa: kegiatan diskusi terhadap permasalahan lokal di

masyarakat, baik yang bersifat fisik dan nonfisik seperti diskusi pembagian jadwal siskamling atau kerja bakti membersihkan lingkungan; kegiatan pendidikan lingkungan dan kebudayaan bagi masyarakat guna mewujudkan masyarakat beradab dan kritis; pelatihan keterampilan kepada masyarakat guna mewujudkan kemandirian masyarakat; kegiatan arisan atau tabungan masyarakat.

Kegiatan yang telah disebutkan di atas, hanyalah beberapa contoh dan tentunya kegiatan di *integrated community space* ini masih banyak lagi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Sebab masyarakat merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Yang jelas, dengan adanya ruang rutinitas alternatif ini dapat meningkatkan interaksi masyarakat yang sifatnya kekeluargaan dan komunikatif. Dari proses interaksi sosial yang terintegrasi dalam sistem kehidupan sosial di masyarakat ini tentu dapat meningkatkan rasa solidaritas antar masyarakat walaupun berbeda-beda, baik secara suku, golongan maupun agama. Sehingga lingkungan masyarakat yang heterogen ini tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sifatnya keberagaman.

Untuk mewujudkan keteraturan sosial di masyarakat ini, selain peran aktif masyarakat itu sendiri. Peran pemerintah, aktivis LSM, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan sivitas akademika kampus juga perlu terlibat dalam mewujudkan keteraturan sosial ini, entah itu menjadi mediator, fasilitator, penyuluh atau trainer dalam kegiatan pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang dilakukan di *integrated community space* ini.

Melalui pendekatan *bottom-up*, diharapkan dapat meminimalisasi segala permasalahan atau ketegangan yang terjadi di masyarakat dengan cara dialogis dan beradab tentunya. Semoga bangsa ini selalu belajar dari masa lalu dan lebih arif dalam menyikapi keberagaman yang ada sebagai bangsa yang memiliki karakter budaya santun.

Syaifudin

Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Jakarta